

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG ETIKA POLITIK

A. Pengertian Etika

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti dalam bentuk tunggal; tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak “*ta etha*” yang artinya adat kebiasaan. Etika adalah ilmu tentang adat kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia. Baik atau buruk perbuatan manusia dapat dilihat dari persesuaian dengan adat-istiadat yang umum berlaku di lingkungan dan kesatuan sosial tertentu.¹

Kata lain dari etika adalah *akhlak*, berasal dari bahasa Arab yaitu *khalaqah* yang berarti menciptakan, dalam bentuk jamak *khuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku. *Akhlak* bukan hanya tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan sesama manusia, namun mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta.²

Akhlak, etika, dan moral mengandung kesamaan yaitu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap perbuatan. Namun memiliki perbedaan standar yang mendasar, bagi *akhlak* standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, bagi etika standarnya adalah pertimbangan akal pikiran, dan bagi moral standarnya adalah adat kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat.³

¹ K. Bretens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 4.

² Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: LPPI, 2001), h.1.

³ Asmaran AS, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 9.

Akhlah, etika dan moral juga dapat dilihat perbedaannya dari objeknya, dimana akhlak menitikberatkan perbuatan terhadap Tuhan dan sesama manusia, sedangkan etika dan moral hanya menitikberatkan perbuatan terhadap sesama manusia saja. Maka istilah akhlak sifatnya teosentris, meskipun akhlak itu ada yang tertuju kepada manusia dan makhluk-makhluk lain, namun tujuan utamanya karena Allah swt. Tetapi istilah etika dan moral semata-mata sasaran dan tujuannya untuk manusia saja. Karena itu, istilah tersebut bersifat antroposentris (kemanusiaan saja).

Menurut Franz Magnis Suseno etika merupakan ilmu atau refleksi sistematis berkaitan dengan pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah moral. Dalam arti yang lebih luas etika diartikan keseluruhan mengenai norma dan penelitian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya.⁴

Tokoh lain yang mengutarakan tentang pengertian etika adalah Aristoteles. Etika menurutnya adalah ilmu tentang tindakan tepat dalam bidang khas manusia. Objek etika adalah alam yang berubah terutama alam manusia, oleh karena itu etika bukan merupakan episteme atau bukan ilmu pengetahuan.⁵ Tujuan etika bukanlah disipisifikan kepada pengetahuan, melainkan praxis, bukan mengetahui apa itu hidup yang baik, melainkan membuat orang untuk hidup yang lebih baik.

⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 6.

⁵ Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad XIX*, (Jakarta: Kanisius, 1998), h. 39

Menurut Franz ada empat alasan mengapa pada zaman sekarang etika sangat diperlukan. Pertama, kehidupan dalam masyarakat yang semakin pluralistik, termasuk juga dalam bidang moralitas. Setiap hari manusia saling bertemu, mereka dari suku, daerah dan agama yang berbeda-beda sehingga menimbulkan sekian banyak pandangan moral yang saling bertentangan, karena mereka menganggap bahwa faham mereka yang paling benar. Kedua, manusia hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan terjadi di bawah hantaman kekuatan mengenai semua segi kehidupan, yaitu gelombang modernisasi. Gelombang ini telah melanda sampai ke segala penjuru tanah air, sampai ke pelosok-pelosok terpencil.⁶

Etika itu bersifat relatif yaitu dapat berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman. Etika juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kebaikan & keburukan dalam hidup manusia khususnya perbuatan manusia yang didorong oleh kehendak serta didasari pikiran yang jernih dengan pertimbangan perasaan.⁷ Karena sebagai suatu ilmu maka Etika terdiri atas berbagai macam-jenis dan juga ragamnya diantaranya:

1. Etika Deskriptif

Memberikan gambaran & ilustrasi tentang tingkah laku manusia ditinjau dari nilai-nilai baik dan juga buruk serta hal-hal yang mana yang boleh dilakukan sesuai dengan norma etis, yang dianut oleh masyarakat. Salah satu contoh etika deskriptif adalah didalam mempelajari pandangan moral terhadap

⁶ Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad XIX*, (Jakarta: Kanisius, 1998), h. 39

⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, h. 23.

kenyataan yang terjadi di Negara Uni Soviet yang selama ini kita kenal sebagai Negara yang menganut paham komunis atau ateis dimana masyarakatnya begitu terbuka terhadap praktek-praktek pengguguran kandungan, namun disisi lain tontonan yang bersifat pornografi mereka memberlakukan aturan-aturan secara ketat.⁸

Dalam contoh kasus tersebut kita menjadi paham dan mengerti tentang realita perilaku moral yang terjadi dinegara tersebut. Dalam situasi demikian, harus kita akui bahwa bagaimanapun manusia itu pada umumnya tahu akan adanya baik dan buruk terhadap suatu hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Pengetahuan tentang baik dan buruk dalam perilaku manusia, disebut kesadaran etis atau kesadaran moral.

2. Etika Normative

Etika normative tidak menggambarkan, tetapi menentukan benar tidaknya suatu perbuatan. Etika normative bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat dipergunakan dalam praktek. Contoh penerapan etika normative adalah Menolak kebiasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena dapat merugikan orang lain.

Etika Normative dikelompokkan menjadi, sebagai berikut ini:

a. Etika Umum

⁸ <http://www.pengertianku.net/2014/06/pengertian-moral-dan-etika-lengkap.html> Diakses. Pada 22 November 2018 Pukul 13:02 WIB

Membahas berbagai macam berhubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil berbagai macam kebijakan berdasarkan teori-teori dan juga prinsip-prinsip moral.

a. Etika khusus

Etika yang terdiri dari etika sosial, etika individu & etika terapan, pengertiannya yaitu:

1. Etika sosial adalah yang menekankan tanggung jawab sosial & hubungan antar sesama manusia dalam aktivitas yang dilakukannya.
2. Etika individu adalah lebih menekankan kepada kewajiban manusia sebagai pribadi.
3. Etika terapan adalah etika-etika yang diterapkan pada sebuah profesi.⁹

B. Pengertian Etika Politik

Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, maka etika politik berarti suatu standar nilai yang disarikan dari nilai-nilai kemanusiaan untuk dijadikan sebagai kerangka acuan teoritik dalam mempersoalkan dan menjelaskan legitimasi politik serta budaya politik masyarakat. Dengan demikian etika politik mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban manusia sebagai manusia, dan bukan hanya sebagai warga terhadap negara, hukum yang berlaku dan sebagainya.¹⁰

⁹ <http://www.pengertianku.net/2014/06/pengertian-moral-dan-etika-lengkap.html>. Di akses pada 22 November 2018 pukul 13:02 WIB

¹⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, h. 8.

Menurut Muhammad Nasaruddin, etika politik adalah upaya untuk semakin memperluas lingkup kebebasan dan menciptakan institusi-institusi yang lebih adil. Definisi tersebut mengacu pada poin sebagai berikut, pertama, lingkup kebebasan yang dimaksud tentu saja adalah kebebasan sosial-politik, artinya syarat-syarat fisik, sosial dan politik yang perlu untuk pelaksanaan kongkret kebebasan, termasuk jaminan terhadap hak-hak. Ini mencakup kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya. Kedua, menciptakan institusi-institusi yang lebih adil karena hal ini ini tidak bisa dilepaskan dari struktur masyarakat.¹¹

Etika politik dalam perspektif Paul Ricoeur mengandung tiga tuntutan. pertama, upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain. Kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan. Ketiga, membangun institusi-institusi yang adil. Tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil.¹²

Menurut Arkoun etika politik adalah pentingnya studi politik yang bernuansa akademis ketimbang mengedepankan studi historis kronologis belaka. Arkoun juga menekankan betapa pentingnya suatu pemerintahan dijalankan dengan memakai logika akademis ketimbang logika politis semata. Ia juga mengkritisi para agamawan yang hanya tampil sebagai legitimator terhadap suatu pemerintahan yang sudah jelas menyimpang dari kebenaran.

¹¹ <http://www.mohammadnasruddin.blogspot.com/2011/03/resume-etika-politik.html>. Di akses pada 22 November 2018 pukul 12:00 WIB

¹² *Op.Cit.*, Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, h. 8

Arkoun juga mengkritisi kaum fundamentalis yang banyak berlindung di balik slogan kebangkitan Islam. Juga tentang pentingnya landasan pembangunan suatu bangsa yang berdasarkan kekuatan budaya dan intelektualisme, bukan semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik material.

Arkoun membedakan antara konsep wewenang dan kekuasaan, di samping itu ia juga mengemukakan ketidaksetujuannya dengan gelar-gelar keislaman yang feodalistik, di mana penguasa banyak yang memanipulasi simbol-simbol agama atau mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan politik mereka.¹³

Menurut M. Quraish Shihab, bahwa kekuasaan politik adalah untuk mengatur masalah-masalah umat, maka apapun proses politik harus dilandasi oleh nilai-nilai moral dan etika yang bersumber pada ajaran agama. Ini sesuai dengan pesan utama Rasulullah Saw., bahwa ia tidak diutus ke dunia melainkan untuk menyempurnakan etika (akhlak) manusia.¹⁴

M. Quraish Shihab menolak pandangan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa politik itu kotor, dalam politik tidak ada kawan atau lawan yang abadi kecuali kepentingan, jangan bawa-bawa moralitas dalam arena politik dan jargon-jargon lain yang berusaha menjustifikasi segala cara untuk mencapai tujuan politik adalah cara pandang yang sesat lagi menyesatkan. Orang boleh saja

¹³ Muhammad Azhar, *Etika Politik Muhammed Arkoun, Jurnal Disertasi*, vol. 10 no. 1, Juni 2012, h. 7.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani: Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Kekuasaan*, (Medan: IAIN Press, 2010), h. 113.

berupaya untuk menggapai kekuasaan politik, bahkan tertinggi sekalipun, namun ia tidak boleh melupakan nilai-nilai moral dan etika.¹⁵

M. Quraish Shihab berusaha memberikan sentuhan moralitas dan nilai-nilai agama dalam setiap proses politik. Ketika bangsa Indonesia berusaha keluar dari berbagai krisis yang mendera, ketika kita ingin bangkit dari keterpurukan, ketika itu pula banyak orang yang menggunakan kesempatan mengatasnamakan rakyat. Mereka berusaha menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan. Akhirnya, jabatan, kedudukan dan wewenang yang mereka peroleh tidak dijalankan dengan mengindahkan nilai-nilai etika.¹⁶

Menurut Aristoteles, Etika adalah pendahulu politik. Politik melengkapi etika. Kebahagiaan bergantung pada sejumlah faktor eksternal (termasuk kesehatan dan beberapa standar hidup minimum) dan pada kebiasaan-kebiasaan internal atau nilai-nilai luhur yang menjaga kita dari pengejaran yang terlalu banyak atau terlalu sedikit terhadap satu kebaikan. Kebahagiaan bukanlah satu keadaan subjektif yang berbeda dari individu ke individu, melainkan sebuah keadaan objektif dari baiknya kondisi seseorang.¹⁷

C. Sejarah Etika Politik

Sejarah perkembangan etika politik kekinian memunculkan kembali semangat moral. Hal itu ditandai banyaknya ilmuwan, politisi, dan pengamat dalam mencari jawaban kerumitan standar tindakan yang etis dan bermoral. Etika menjadi suatu keyakinan dalam masyarakat dan kecenderungan pribadi.

¹⁵ *Ibid.*, h. 113

¹⁶ *Op.Cit.*, Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani*, h. 114.

¹⁷ Joseph Losco-Leonard Williams, *Political Theory: Kajian Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 179.

Tradisi dan agama dilirik oleh banyak orang untuk mencari bimbingan dalam memecahkan masalah etika.

Namun dua bidang ilmu tersebut memiliki keterbatasan sehingga terkadang nilai-nilai tradisi dan agama terjadi tumpang tindih. Tradisi bisa menjadi nilai moral yang ada pada agama, begitu juga sebaliknya, agama bagian dari tradisi yang sumber nilainya masih diberlakukan.¹⁸

Sejarah etika politik sudah ada sejak lama, bahkan sebelum adanya negara yang mengatur tata kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Para filosof politik klasik berusaha menjawab tentang struktur-struktur organisasi mana yang paling baik.

Bagi Plato, negara yang baik adalah negara yang merealisasikan keadilan yang di tata selaras dan seimbang dengan pimpinan yang berorientasi pada idea metafisik kebaikan. Dia yakin bahwa etika politik seperti itu paling sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat dengan demikian paling menunjang kebaikan masyarakat. Bagi Aristoteles, pendekatan etis yang dilakukannya adalah kebahagiaan.¹⁹

Menurut Aristoteles dengan adanya negara, manusia dapat hidup bahagia, maka tingkah laku manusia harus memiliki keutamaan-keutamaan etis. Negara yang paling baik adalah negara yang organisasinya sesuai dengan fungsinya. Serta dipimpin oleh orang yang berpengalaman dan memiliki keutamaan yang

¹⁸ Virginia Held, *Etika Moral: Pembeneran Tindakan Sosial*, terj. Drs. Y. Ardy Handoko, cetakan kedua, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 9.

¹⁹ Frans Magnis Suseno, *13 Model Pendekatan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 36.

diperlukan. Negara yang paling baik adalah negara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁰

Dalam fase filsafat politik Yunani belum mengenal legitimasi kekuasaan. Etika politik pada waktu itu belum merefleksikan nilai transendental dan belum memahami arti kesejahteraan. Kemudian berkembang terhadap pemikiran yang mengajukan tuntutan legitimasi etis. Dalam fase ini legitimasi etis menjadi sorotan dalam etika politik. Augustinus mengajukan bahwa legitimasi etis terdapat dalam negara, yang dibedakan menjadi dua yaitu negara Allah dan negara duniawi. Negara Allah yang akan mencapai kesempurnaan pada akhir zaman, sedangkan negara akan hancur pada akhir zaman nanti.²¹ Namun Augustinus belum menerangkan kerangka etika politik secara teoritis.

Perkembangan berikutnya muncul tokoh filosof Thomas Aquinas yang kembali menggali tuntunan legitimasi politik. Fokus perhatiannya pada bidang kenegaraan dan politik, khususnya hubungan negara dengan hukum kodrat. Menurutnya, hukum kodrat merupakan hukum dasar moral yang mencerminkan hukum kebijaksanaan Ilahi. Pendekatan etis ini merupakan moralitas manusia sebagai ketaatan kepada hukum kodrat. Inti filsafat negara Thomas Aquinas adalah bahwa eksistensi negara bersumber dari kodrat manusia. Bagi Thomas Aquinas, negara merupakan realitas positif dan rasional.²²

²⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, h.190.

²¹ *Ibid.*, h. 198.

²² *Op.Cit.*, Frans Magnis Suseno: *13 Model Pendekatan Etika.*, h. 36

Selanjutnya etika politik berkembang menjadi kajian yang lebih sistematis. Pada abad ke-17 muncul tokoh-tokoh filsafat yang mengembangkan pokok-pokok etika politik. Konsep Jonh Locke tentang “pemisahan kekuasaan gereja dengan kekuasaan negara”, “kebebasan berpikir dan bernegara”, “pembagian kekuasaan”, dan konsep “hak asasi manusia”. Selain itu ada tokoh-tokoh lain yang berminat terhadap etika politik, yaitu Montesquie dengan gagasan “pembagian kekuasaan”. Rousseau dengan pemikiran “kedaulatan rakyat”. Khan dengan gagasan tentang “negara hukum demokrasi/republican”²³.

Dalam dunia Islam, para filosof dan ahli politik Islam melihat reaksi politik dan adanya semangat teologi mendorong mereka untuk membuat aturan pemilihan seorang pemimpin pemerintahan untuk mewujudkan negara ideal. Para pemikir Islam mulai menyadari bahwa Islam memperhatikan dalam menciptakan dan mengembangkan negara ideal dan ajaran etika politik.

D. Etika Politik Dalam Negara Demokrasi

Demokrasi sebenarnya adalah bentuk pemerintahan yang paling rumit dibandingkan dengan bentuk pemerintahan yang lain. Banyak pertentangan dan ketegangan dan mensyaratkan ketekunan para penyelenggaranya agar bisa berhasil. Demokrasi tidak dirancang demi efisiensi, tetapi demi pertanggungjawaban. Sebuah pemerintahan yang demokratis mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil

²³ Frans Magnis Suseno, artikel di tulis dari kuliah umum “*Sekitar Etika Politik*”, (Yogyakarta: UGM, 2007).

tindakan, bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk hal itu. Setiap bentuk demokrasi adalah sistem yang bertumbuh dan berkembang, oleh sebab itu setiap bangsa harus menata pemerintahannya yang berpijak pada sejarah dan kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Meskipun diakui adanya prinsip-prinsip umum atau dasar yang harus ada dalam setiap demokrasi, misalnya tata cara pembuatan Undang Undang bisa sangat bervariasi pelaksanaannya, namun apapun bentuknya pembuatan ini harus mematuhi prinsip dasar keterlibatan rakyat dalam prosesnya sehingga mereka merasa memiliki aturan tersebut.²⁴

Negara demokrasi pastilah berkaitan dengan bentuk pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi atau aturan main perundang-undangan yang berarti dibatasinya kekuasaan para pemimpin dan lembaga-lembaga pemerintahan, dan pembatasan ini ditegakkan melalui prosedur yang sudah mapan. Dengan memperhatikan sifat negara bersangkutan, maka dikenal adanya demokrasi presidensial (seperti Amerika Serikat), demokrasi parlementer (seperti di Inggris) dan demokrasi prosedural. Jika demokrasi presidensial menyangkut presiden sebagai kepala negara yang praktis selama masa jabatannya dipercaya untuk memegang pemerintahan, demokrasi parlementer mengenal perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, dan oleh sebab itu bergantung masa jabatannya kepada kepercayaan yang diberikan. Kepercayaan ini bagi demokrasi presidensial langsung diberikan oleh rakyat yang sengaja memilihnya, dan pada umumnya berlaku untuk sekali masa jabatan.²⁵

²⁴ Runi Harianti, *Etika Politik Dalam Negara Demokrasi*, Vol.II No.1 Th. 2003

²⁵ *Ibid.*

Sedangkan pada demokrasi parlementer kepercayaan ini walau bersandar pada pemilihan umum, tetapi bisa juga berakhir bila parlemen dalam hal tertentu tidak menyetujui kebijakannya lagi, dan oleh sebab itu memerlukan pemilihan umum baru. Namun biasanya masa jabatannya pun dari pemilihan umum ke pemilihan umum. Dalam hal demokrasi parlementer bisa pemilihan umum memegang kelompok atau partai perdana menteri yang sedang menjabat dan jabatannya bisa terus menerus; tetapi bila ia kalah, ia pun dengan sportif mundur. Sportifitas merupakan cermin etika dalam berpolitik.²⁶

Demokrasi prosedural menekankan prosedur dalam berdemokrasi. Maksudnya melihat demokrasi sebagai suatu proses, terutama dalam melaksanakan sistem dari permulaan sampai kepada hasilnya.²⁷ Misalnya bagaimana persiapan pemilihan umum, mulai dari pelaksanaan dan pemungutan hasil pemilihan umum. Apakah panitia yang bersangkutan netral atau berpihak? Apakah semua yang berhak sudah terdaftar? Apakah pelaksanaan pencoblosan, umpamanya bergantung semata-mata pada pemilih atau pelaksana dan pengawas turut menentukan atau mengarahkan? Semua berkaitan dengan etika.²⁸

Demokrasi secara umum mengenal beberapa sifat dan syarat, baik secara konstitusional maupun secara prosedural. Mulai dari hal-hal asasi manusia termasuk soal persamaan, kebebasan dan keadilan. Maka dalam suatu negara demokrasi tiap warga negara mempunyai hak yang sama. Hak yang sama ini mencerminkan keadilan, tetapi hak yang sama ini hanya mungkin terjelma

²⁶ Runi Harianti, *Etika Politik Dalam Negara Deokrasi*, Vol.II No.1 Th. 2003

²⁷ Deliar Noer . *Etika Politik dan Negara Demokrasi*. (Unisia No. 35. Yokyakarta. 1997) h. 5

²⁸ Runi Harianti, *Etika Politik Dalam Negara Deokrasi*, Vol.II No.1 Th. 2003

dalam rangka kebebasan. Maka persamaan, kebebasan dan keadilan merupakan nilai tiga serangkai yang berkaitan sesamanya, yang dalam etika harus tegak bersama-sama sekaligus. Namun dalam kenyataan ketiga nilai tersebut yang merupakan cermin etika politik tidak utuh ditegakkan.²⁹

E. Etika Politik di Indonesia

Sebagai negara yang berdasarkan ideologi pancasila, tentunya setiap kegiatan serta pengambilan keputusan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara harus berlandaskan dengan Pancasila. Pancasila juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta sebagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.³⁰

Namun seiring berjalannya waktu ketidakjelasan terjadi di berbagai tindakan politik saat ini. Fungsi pelindung rakyat tidak berjalan sesuai komitmen, banyaknya penyimpangan-penyimpangan sosial yang dilakukan pejabat serta aparat pemerintah menjadikan keadaan publik terutama politik semakin kacau. Politik dan etika terpisah seperti minyak dan air. Jika duduk dalam kekuasaan, aparat pemerintah cenderung menumpuk dan menggunakan kekuasaan itu secara semena-mena. Jadi, sebaik apapun seseorang sebelum duduk dalam posisi kekuasaan, sekali ia berkuasa akan terbuka kemungkinan untuk tergoda hawa kekuasaan yang cenderung mengajak menyimpang.

²⁹ Runi Harianti, *Etika Politik Dalam Negara Deokrasi*, Vol.II No.1 Th. 2003

³⁰ Hariyanto, Muhsin, 2014. *Etika Politik di Indonesia*. <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/etika-politik-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 23 November 2018

Akibatnya kebajikan dasar kehidupan bangsa seperti peradaban, tanggungjawab, keadilan dan integritas runtuh.³¹

Di era sekarang politik Indonesia tak jarang keluar dari norma dan cenderung tidak beretika. Ambisi untuk menempati jabatan tertinggi dan mensejahterakan diri sendiri tentu menjadi alasan utama. Contoh realita politik Indonesia yang sering kali keluar dari etika: Money Politic, Kampanye Hitam (Black Campaign), Nepotisme, Golput (Golongan putih), dan Korupsi.

F. Etika Politik Dalam Pandangan Islam

Etika Politik Islam adalah seperangkat aturan atau norma dalam bernegara di mana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Adapun mengenai aplikasi nilai-nilai etika tersebut merujuk kepada pola kehidupan Nabi Muhammad Saw baik kehidupan secara umum maupun secara khusus, yaitu dalam tatanan politik kenegaraan.³²

Dalam mendeskripsikan Etika Politik dalam konsep Islam, dapat ditempuh beberapa pendekatan, yaitu *pertama*, pendekatan nilai; yakni nilai-nilai yang terkandung dalam Islam yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat atau bernegara; *kedua*, pendekatan sejarah, khususnya pada zaman nabi Muhammad SAW dan para Sahabat; dan *ketiga*, pendekatan pemikiran ulama berkaitan dengan Etika Politik. Uraian secara akumulatif dari

³¹ Hariyanto, Muhsin, 2014. *Etika Politik di Indonesia*. <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/etika-politik-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 23 November 2018

³² Khazanah Hakiki, 2009. Etika Politik Islam *mhakicky.blogspot.com*. Diakses pada 14 Maret 2019 pukul 18:13 WIB

hasil ketiga pendekatan ini akan berujung pada perumusan Etika Politik dalam konsep Islam.

Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Islam yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat atau bernegara, yang berasal dari sumber ajaran pokok agama Islam yakni Al-Quran , Hadits atau Sunnah Rasul dan Ijtihad.

Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia, maka tidak berlebihan apabila Al-Quran dijadikan sebagai konsep etika politik, dimana etika ingin menjawab “bagaimana hidup yang baik”.³³ Dengan demikian Al-Quran menerangkan tentang etika dan moral sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”³⁴ (Q.S. Al-Imran 159)

Kandungan ayat tersebut di atas menerangkan tentang etika dan moral kepemimpinan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi umat, antara lain memiliki sifat lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan atau perbuatan, serta memberi kemudahan dan ketentraman kepada masyarakat. sifat-sifat ini merupakan faktor subyektif yang

³³ Frans Magnis Susena, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Cet. XIII; Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 187.

³⁴ Q.S Al-Imran : 159

dimiliki seorang pemimpin yang dapat merangsang dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi dalam musyawarah. Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat-sifat tersebut di atas, niscaya orang akan menjauh dan tidak memberi dukungan.³⁵

Dalam sejarah, kaum Majusi telah menguasai dunia selama empat ribu tahun. Kelanggengan kekuasaan hanya dapat terjadi dengan perilaku adil terhadap rakyat dan memelihara urusannya secara bersama-sama. Mereka tidak membiarkan kezaliman dalam urusan agama dan keyakinan mereka. Mereka mengelolah negaranya dengan adil. Mereka juga senantiasa berbuat adil terhadap manusia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kemakmuran dan kehancuran dunia bergantung kepada penguasanya. Jika penguasa adil, maka dunia akan makmur dan rakyat akan merasa aman, sebaliknya penguasa tidak adil, maka dunia akan runtuh.

Sejalan dengan apa yang dipaparkan di atas, Faisal Baasir mendasarkan etika politik bangsa dan negara pada nilai-nilai luhur ajaran agama adalah suatu keharusan. Sebab agama merupakan sistem nilai yang diyakini kebenarannya, ia adalah lentera dan panduan kehidupan serta modal ketenangan jiwa sebelum seseorang menentukan suatu tindakan tertentu.³⁶

Al-Quran sebagai sumber gagasan etika politik berusaha menanamkan perilaku yang baik kepada para pemimpin untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang berwibawa. Oleh karenanya perilaku rakyat sangat

³⁵ Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Alquran* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 260

³⁶ Faisal Baasir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. xxxvii.

tergantung dari kebijakan para pemimpin, rakyat bermoral adalah cerminan dari seorang pemimpin. Pemimpin yang bertanggungjawab adalah pemimpin yang beretika dan bermoral yang bersumber dari nilai-nilai luhur agama. Dengan demikian segala tindakan yang baik, adil, beramanah dari pemimpin akan mendapatkan syafaat, selama pemimpin tidak keluar dari koridor yang telah digariskan oleh Allah swt dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia.

Menurut Muhammad Thahir Azhari ada beberapa prinsip Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yakni diantaranya, kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, prinsip keadilan sosial, prinsip persamaan, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat.³⁷

1. Amanah

Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain. Prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kekuasaan sebagai amanah. Prinsip amanah tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Arti : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

³⁷ Faisal Baasir, *Etika Politik Dalam Seorang Politisi Muslim*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 132

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”³⁸ (Q.S. An-Nisa : 58)

Makna amanah adalah “titipan” atau “pesan”. Dalam demokrasi Islam, amanah dipahami sebagai “sesuatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu bentuk pemeliharaan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Quran yang kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.³⁹ Seseorang yang bertanggungjawab diharapkan takut kepada Allah terhadap apa yang ditugaskan kepadanya dari urusan umat agar ia ingat betapa besarnya amanah yang diemban untuk mengerjakannya.

Secara substansial amanah merupakan kemampuan moral dan etika yang akan kemungkinan manusia membangun sikap positif dan menghilangkan sikap negatif. Dalam konteks kenegaraan, bahwa amanah dapat berupa kekuatan atau kepemimpinan. Sebab ia merupakan kekuatan atau kepemimpinan yang berasal dari pendelegasian atau pelimpahan kewenangan oleh orang-orang yang dipimpinya. Oleh karena itu, pemegang kekuasaan atau pemimpin wajib berlaku adil dalam arti yang sesungguhnya. Amanah dalam hal ini adalah sikap penuh tanggung jawab, jujur, dan memegang teguh prinsip.

2. Musyawarah

Musyawarah adalah suatu pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, dan perembukan.⁴⁰

³⁸ Q.S Al-Nisa: 58

³⁹ Faisal Baasir, *Etika Politik Dalam Seorang Politisi Muslim*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 145.

⁴⁰ <http://kbbi.kata.web.id/musyawah/> Diakses Pada Tanggal 11 November 2018, Pukul 20:07 Wib.

Prinsip musyawarah dalam Al-Quran secara jelas megatakan pada surah As-Syuraa ayat 38 :

يُنْفِقُونَ رِزْقَنَا هُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمُ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ

Arti: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.”⁴¹ (Q.S. As-Syuraa : 38)

Oleh karena itu, musyawarah telah diajarkan Islam kepada manusia. Jadi, sangatlah penting bagi kita memutuskan suatu perkara dalam upaya membangun kehidupan sosial yang demokratis.

3. Keadilan Sosial

Agama Islam telah mengajarkan kepada ummat manusia untuk menegakkan keadilan terhadap sesama manusia. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Arti : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum yang mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti dengan apa yang kamu kerjakan.”⁴² (Q.S. Al-Maidah :8)

Perintah untuk menegakkan keadilan dalam Al-Quran yang berisikan tentang keadilan, bahwa untuk menegakkan keadilan tidak hanya berlaku untuk pemimpin yang mempunyai perjanjian atau kontrak dengan Tuhannya, tetapi menegakkan keadilan juga berlaku bagi setiap Muslim apapun itu status sosialnya. Dalam kamus bahas Indonesia pun kata adil diartikan, tidak berat

⁴¹ Syamsil *Al-Quran*, h. 487

⁴² Syaamil *Al-Quran*, h. 108

sebelah atau memihak, berpihak kepada kebenaran dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁴³

4. Persamaan

Persamaan adalah mempersamakan (tingginya, tingkatnya, dan sebagainya) perlu diperjuangkan terus persamaan hak bagi semua orang.⁴⁴ Dalam Islam, prinsip persamaan bermakna luas, persamaan juga mencakupi segala bidang kehidupanyang meliputi persamaan dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hujrat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Arti : “Wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti.”⁴⁵ (Q.S. Al-Hujrat : 13)

5. Perdamaian

Pada hakikatnya perdamaian merupakan keinginan setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama dalam hal menyelesaikan konflik tentunya harus dilakukan secara damai. Sementara itu, agama Islam telah mengajarkan kepada manusia di muka bumi ini untuk mengutamakan perdamaian dan keselamatan di antara sesama manusia dan antar bangsa.

Karena, keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya dijadikan Allah untuk saling mengenal dan bekerja sama dengan menjaga dan memelihara

⁴³ <http://Kbbi.Web.Id/Adil> Diakses Pada 11 November 2018, Pukul 20:10 Wib.

⁴⁴ <http://kbbi.web.id/persamaan> Diakses Pada 11 November 2018, Pukul 20 :12 Wib

⁴⁵ Syaamil, *Al-Quran*, h, 517.

perdamaian antara manusia. Dengan demikian, manusia di dalam Islam dituntut untuk saling mengenal dan bekerjasama dengan menjaga dan memelihara perdamaian antara manusia. Manusia di dalam Islam dituntut untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhkan kemunkaran. Karena, permusuhan dan peperangan merupakan suatu perbuatan yang saling dilarang oleh Islam. Al-Quran hanya mengizinkan tindakan kekerasan dan perang apabila pihak lain yang memulai serangan terhadap umat Islam. Hal ini dapat dirujuk pada suran Al-Baqarah ayat 109 :

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ
مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

Arti : “ Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang melampaui batas.”⁴⁶ (Al-Baqarah : 109)

6. Prinsip Kesejahteraan

Sejahtera berarti aman, sentosa, dan makmur. Yakni jauh dari gangguan, kesulitan, dan lain sebagainya. Kesejahteraan tidak hanya mencakup pada lahir saja tetapi juga batin untuk mencapai ridha Allah. Upaya mencapai kesejahteraan adalah pemenuhan kebutuhan lahir, dan batin, dan negara wajib melayani, memfasilitasi, mengayomi masyarakat untuk menjamin akan kebutuhan tersebut. Kesejahteraan lebih kongkritnya adalah negara yang “*baldatun thayyiban warobbun ghafur*”, yaitu negeri yang sejahtera dibawah ridha Allah SWT. Tolak ukur Islam dalam kesejahteraan ini adalah bukan kesejahteraan personal, melainkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Islam mengharuskan kepada para pemeluknya untuk mengeluarkan zakat, hibah,

⁴⁶ Al-Baqarah : 190

wakaf, sedekah, infak, dan lain sebagainya dengan tujuan agar tidak ada lagi kesenjangan sosial hingga kesejahteraan sosial yang benar-benar diperoleh.⁴⁷

Dalam kepedulian sosial, ayat Al-Quran selalu mengingatkan kita bahwa setiap rezeki yang kita miliki, itu ada hak orang lain yang membutuhkan dan harus ditunaikan. Seperti dalam durah Al-Maun 1-7 :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3)
بِالَّذِينَ
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6)
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)

Arti : “Tahukah engkau yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak mendorong memberi makan miskin. Maka celakalah orang-orang yang (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang riya’, dan mereka yang enggan (memberikan) bantuan.”⁴⁸ (Q.S. Al-Maun 1-7)

7. Prinsip Ketaatan Rakyat

Ketaatan berasal dari kata taat. Berdasarkan KBBI taat artinya senantiasa tunduk (kepada Tuhan, perintah, dan patuh).⁴⁹ Ketaatan rakyat pada pemerintah bersifat wajib sejauh mana ketaatan itu menuju kebaikan kebenaran. Sebaliknya, jika pemerintah melakukan kesalahan maka rakyat berhak untuk mengkritik dari setiap kesalahan maupun kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa agar kembali pada jalur kebenaran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisaa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁴⁷ Faisal Baasir, *Etika Politik*, h. 164-166

⁴⁸ Syaamil *Al-Quran*, h. 602.

⁴⁹ <http://kbbi.web.id/taat> Diakses Pada 11 November 2018 Pukul 20:18 Wib.

Arti: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kau berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan rasul (Sunah-Nya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya.”⁵⁰ (Q.S. An-Nisaa : 59)

⁵⁰ Syaamil *Al-Quran*, h. 87